

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Landasan Teori dan Konsep

##### 2.1.1. Teori Konflik

Merujuk pada pendapat dari Galtung (2007:131), konflik merupakan sebuah kondisi dimana negara atau individu merasa dilema dan terancam atas kehadiran pihak lainnya. Dalam artian, baik itu terjadi ataupun tidak terjadi kekerasan sekalipun, apabila suatu pihak merasakan adanya tantangan dan ancaman dari pihak lain maka hal tersebut mengindikasikan adanya sebuah konflik.

Banyak hal yang menjadi alasan terjadinya konflik dalam sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini merujuk pada Boulding (1963:4) yang menyatakan bahwa "*Conflict exists when any potential position of two behaviour units are mutually incompatible*". Oleh karenanya, dapat dinyatakan bahwa pengertian sederhana dari konflik ialah sebuah fenomena dinamis dimana salah satu aktor melakukan reaksi atas apa yang dilakukan oleh aktor lainnya, dinamika reaksi tersebut tidak jarang berlanjut dalam aksi yang lebih jauh dan bisa saja memicu kerusuhan dan bahkan perang diantara mereka.

Konflik ialah sebuah bentuk sikap perlawanan yang melibatkan dua atau lebih aktor dengan disertai sikap permusuhan yang intens. Kondisi dimana terjadi kelangkaan dan ketidaksesuaian dapat menjadi sumber terjadinya pertengkaran (Jeong, 2010: 3). Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari karena konflik pada dasarnya merupakan bagian dari *human nature*. Meskipun tidak dapat dihindari, konflik tetap bisa dikendalikan dengan cara mencari jalan penyelesaian dengan tujuan agar konflik tidak mengalami peningkatan eskalasi sehingga menghasilkan dampak yang lebih besar.

Teori konflik sendiri memiliki berbagai macam versi dan teori turunan lainnya. Meskipun dari seluruh teori konflik yang ada memiliki terminologi dan juga fokus yang berbeda berkenaan dengan konflik,

namun seluruh teori konflik tersebut tetap memiliki *concern* yang sama yakni konseptualisasi tentang bagaimana pertentangan yang terjadi dieskpresikan oleh pihak yang berkonflik dan diselesaikan melalui beberapa cara (Schellenberg, 1996:12). Walaupun demikian, setiap teori konflik yang ada berdiri dengan menggunakan persepektif yang berbeda terkait definisi dan akar penyebab konflik itu sendiri. Oleh karenanya, sebagai dasar utama dalam menganalisa konflik di semenanjung Korea dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori konflik melalui perspektif *social structural theory*.

Teori sosial struktural ialah salah satu turunan dari teori konflik yang mendefinisikan konflik sebagai produk dari bagaimana sebuah masyarakat atau kondisi sosial dibentuk dan dikelola. Dalam konteks internasional, Morgenthau, Galtung, dan Wallerstein (1996:98) menyebutkan jika "*Social structure applies not only to a society, but also to relations between societies*". Lebih jauh lagi, ketiganya melihat jika "*world structured as a system of national states with constant tensions and conflicts*" (Schellenberg, 1996:98). Dengan demikian, teori sosial struktural dalam rana global atau internasional dapat dijelaskan sebagai sebuah hubungan antar *states* (negara-negara) yang bertentangan. Sehingga, secara lebih luas teori sosial struktur dalam teori konflik dapat menjelaskan mengenai hubungan antar negara yang penuh dengan intensitas dan juga ketegangan sebagai akibat dari adanya mekanisme struktural yang terjadi secara global baik dalam rana militer dan politik. Seperti yang dikemukakan oleh Wallerstein (1974:224) bahwa adanya perbedaan kekuatan politik dan ekonomi di dunia, akan mengakibatkan terjadinya friksi dan juga ketegangan diantara negara-negara yang ada.

Merujuk pada karakteristik teori tersebut apabila dikaitkan dengan kondisi konflik di Semenanjung Korea, maka kondisi sosial struktural yang dimaksudkan ialah sejarah masa lampau baik yang berkaitan dengan urusan militer dan politik di Semenanjung Korea yang banyak dipengaruhi oleh kondisi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang

menjadi cikal bakal konflik Korea Selatan dan Utara dimasa sekarang. Dengan demikian, ketegangan antara Korea Utara dan Selatan pada saat ini merupakan hasil dari kondisi struktural yang terjadi di masa lalu dimana merupakan kelanjutan dari Perang Korea yang terjadi di tahun 1950 sebagai akibat dari berlangsungnya perang Dingin.

Selain itu, kondisi struktural sosial yang membentuk ketegangan di Semenanjung Korea pada saat ini juga banyak dipengaruhi oleh keberadaan aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan di Semenanjung Korea yang disisi lain menjadi dilema keamanan bagi Korea Utara. Oleh karenanya, kondisi *balance of power* tidak dapat dihandari antara kedua negara. Hal inilah yang kemudian menjadikan ketegangan terus berlanjut dan Ketegangan yang terus terjadi tidak menutup kemungkinan dapat tereskalasi menjadi konflik yang lebih besar dan tentunya dapat mengancam keamanan kawasan dan global.

Berdasarkan teori konflik yang dijelaskan dengan pendekatan *social structural theory* dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi di Semenanjung Korea tidak lain terjadi karena dilatar belakangi oleh masalah struktural dari masa kolonialisme jepang dan dipertajam pada masa perang dingin yang memicu terjadinya perang sipil di Korea pada tahun 1950. Perang sipil (*korean war*) inilah yang kemudian menjadi awal dari ketegangan di Semenanjung Korea hingga sampai sekarang.

### **2.1.2. Teori Resolusi Konflik**

Setiap konflik memiliki karakteristik yang berbeda, dan tidak jarang sebuah konflik akan terus berlangsung apabila terjadi *unsatisfaction situation* dimana kedua belah pihak masih belum menemukan satu persamaan terkait kepentingan pihak yang ada. Sehingga berimbas pada kegagalan sebuah negara untuk mengelola hubungan mereka yang “*antagonistic*” (Jeong, 2010: 3). Kondisi demikian dapat memunculkan *protracted conflict* dimana konflik tetap berlangsung dalam periode yang cukup lama dan bahkan dari generasi ke generasi. Salah satu contoh

konkrit dari *protracted conflict* ialah konflik di Semenanjung Korea antara Korea Utara dan Korea Selatan yang berlangsung hingga lebih dari 60 tahun.

Sebagai awal proses pencarian jalan keluar konflik, perlu adanya keinginan kuat serta komitmen dari para pihak yang bertikai untuk sama-sama menyelesaikan konflik dan membangun sebuah kondisi damai. Meskipun demikian, selain komitmen pihak yang berkonflik untuk menemukan penyelesaian masalah, kelemahan dalam menghasilkan *win-win solution* ialah tergantung adanya konstelasi kepentingan dan tersedianya alternatif pilihan (Jeong, 2010:11). Salah satu alternatif untuk mencari jalan keluar permasalahan yang ada ialah dengan resolusi Konflik.

Resolusi konflik adalah sebuah upaya untuk membuat pihak yang sedang berkonflik agar mencapai suatu kesepakatan atau *agreement* baik melalui adanya perubahan lingkungan atau juga melalui keterlibatan pihak ketiga (Schellenberg, 1996:9). Pada konflik yang telah berlangsung cukup lama, seringkali tidak jelas bagaimana memprediksi kapan resolusi dapat dicapai. Persepsi hasil yang ingin dicapai tentu akan berbeda diantara pihak-pihak yang terkait mengingat tujuan dan masalah yang dimiliki tentu berbeda satu dengan yang lainnya (Jeong, 2010: 12). Oleh karena itu, variabel dalam mekanisme resolusi konflik tidak seluruhnya dapat diaplikasikan dalam tiap konflik, mengingat setiap konflik memiliki karakteristik dan juga tipologi yang berbeda.

Adapun untuk menjelaskan mengenai inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea oleh masyarakat sipil, penulis menggunakan beberapa variabel yang terdapat di dalam teori resolusi konflik yang dianggap mampu mewakili untuk menjawab permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian. Merujuk pada teori konflik dengan pendekatan *social structural theory* yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat beberapa pendekatan yang ditawarkan sebagai instrumen resolusi konflik, diantaranya ialah (Schellenberg, 1996:99-100):

a. *Gradual Reform*

Perubahan bertahap, yakni memungkinkan adanya perubahan terhadap struktur sosial yang ada di negara atau masyarakat yang bertikai. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan pola hubungan pihak yang berkonflik ataupun dalam tatanan kebijakan. Tidak mudah untuk melakukan perubahan, oleh karena itu perlu adanya cara dan waktu yang bertahap dan konstan. Selain itu, dalam proses tersebut juga memerlukan adanya peran pihak ketiga yang netral sebagai kontrol dan negosiator dalam upaya mewujudkan perubahan terkait hubungan pihak yang berkonflik.

Untuk kasus di Korea Utara dan Selatan, proses *gradual reform* bukan sesuatu yang baru. Beberapa kali telah dilakukan upaya perubahan terkait struktur sosial yang ada dengan menyorot kepada perubahan kebijakan, khususnya terkait kebijakan penghentian proliferasi nuklir oleh Korea Utara. Namun hal tersebut tidak efektif karena bagi Korea Utara Nuklir merupakan sebuah bentuk *deterrence* negara dalam menghadapi dinamika ancaman di Semenanjung Korea khususnya terkait aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Untuk itu, perlu adanya alternatif lain diantaranya ialah dengan melakukan perubahan pola hubungan di level masyarakatnya. Hal tersebutlah yang saat ini di upayakan oleh GPPAC (*Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict*) dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea, yang mana *gradual reform* dimulai dari tatanan *grassroot* guna membangun kembali hubungan baik antara kedua negara melalui pendekatan level *people to people* atau *track II*.

b. *Non-Violent Confrontation*

Merupakan salah satu pendekatan solusi penyelesaian masalah dalam mekanisme teori sosial struktural. Berbeda dengan pendekatan *gradual reform* yang lebih melihat kepada tujuan atau hasilnya. *Non-Violent Confrontation* justru lebih mengarah kepada pergerakan atau tindakan yang dilakukan untuk mengupayakan perubahan sosial yang

fundamental dalam sebuah konflik dengan cara-cara damai atau *non-violent*. Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh semua pihak, baik melalui level negara (pemerintah) atau organisasi masyarakat sipil. Dalam kasus ini, *non-violent confrontation* sebagai upaya mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea dilakukan oleh GPPAC sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil Internasional.

Hal ini tentu sesuai dengan mekanisme resolusi konflik dalam tataran praktiknya secara umum yang diantaranya ialah *facilitation*. Dalam mekanisme fasilitasi, terdapat beberapa komponen yang salah satunya ialah dialog. Secara luas, proses fasilitasi dimaknai sebagai upaya mencapai konsensus atau perjanjian tertentu melalui metode fasilitatif guna menemukan opsi yang dapat diterima oleh pihak yang berbeda. Selain itu, proses fasilitatif juga dapat digunakan sebagai usaha *problem solving* dan menciptakan kesempatan atau *opportunity* untuk membangun hubungan pihak yang berkonflik dan dapat memungkinkan mengarah kepada negosiasi secara resmi (Jeong, 2010: 192-193).

Dalam proses resolusi konflik, tidak jarang pihak yang berkonflik menolak untuk melakukan dialog. Oleh karenanya, memfasilitasi pertemuan merupakan salah satu langkah awal untuk mencairkan hubungan pihak yang berkonflik. Jeong (2010: 192-193) menyatakan bahwa konflik yang sifatnya *protracted* menandakan jika kedua pihak yang bertentangan telah kehilangan rasa kepercayaan satu sama lain. Sehingga, untuk menyusun sebuah resolusi konflik perlu terlebih dahulu menciptakan "*mutual understanding*" diantara pihak yang ada yang dapat dilakukan melalui *group discussion* dan dialog.

Untuk meningkatkan *trust* dan *understanding*, dapat dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang mampu mempengaruhi dinamika kelompok. Menurut Lynch (2005) dalam Jeong (2010: 193), fasilitasi ialah "*the art of possible that derived from bringing the adversaries to forge mutual understanding on specific issues instead of position taking*". Dengan demikian, fasilitasi cukup berbeda dengan

negosiasi dimana proses fasilitasi lebih menitik beratkan pada dialog lebih bertujuan untuk membangun sebuah *mutual understanding* terlebih dahulu, berbeda dengan negosiasi yang lebih berorientasi kepada memuaskan kepentingan seluruh pihak yang terlibat (Jeong, 2010:193).

Sasaran dari proses dialog ialah membangun dan mengembangkan *framework* bersama terkait permasalahan. Untuk itu, proses fasilitasi (dialog) lebih banyak dilakukan oleh pihak ketiga yang kebanyakan diantaranya ialah kelompok masyarakat sipil baik akademisi maupun pemuka agama yang memiliki posisi lebih netral. Sesuai dengan konsep *human development* yang dipopulerkan oleh UNDP (*United Nation Development Program*) dan perwakilan UN lainnya yang berfokus pada membangun dari *grassroot*-nya (Jeong, 2010:198). Selain itu, dialog juga merepresentasikan sebuah praktek kritis dalam upaya penciptaan makna dan pembangunan komunitas. Untuk itu, kunci utama dialog ialah komunikasi yang dilakukan dengan toleransi terkait keanekaragaman perspektif (Kellet dan Dalton, 2001).

Sebagai bentuk keterlibatan GPPAC dalam proses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea, GPPAC melalui kontributor GPPAC NEA memfasilitasi adanya dialog yang diselenggarakan di Ulaanbataar Mongolia. Dialog merupakan salah satu komponen terpenting dalam proses membangun perdamaian. Tujuan dialog ialah mengembangkan pendekatan kebersamaan dalam rangka resolusi konflik dan upaya memperbaiki hubungan antara individu atau kelompok yang ada. Selain itu langkah membangun kepercayaan juga merupakan komponen terpenting dalam dialog. Upaya membangun kepercayaan tidak lain untuk mengurangi ketegangan, serta menciptakan rasa saling pengertian dan mengidentifikasi kemungkinan dilakukannya kerjasama lintas konflik. Melalui proses dialog, diharapkan dapat terbangun rasa saling pengertian antara pihak yang berkonflik dalam hal ini antara Korea Utara dan Korea Selatan, agar memungkinkan terjadinya perdamaian diantara keduanya.

Berdasarkan teori resolusi konflik, variabel fasilitasi menjadi sebuah kerangka penting bagi inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea oleh masyarakat sipil yang dalam hal ini ialah GPPAC. Dalam prakteknya, jaringan organisasi masyarakat sipil dunia tersebut berupaya untuk membangun dialog dengan memfasilitasi masyarakat sipil dari negara yang berkonflik dan juga masyarakat sipil lainnya untuk bersama-sama melakukan dialog perdamaian guna membangun hubungan hingga muncul rasa saling percaya satu sama lainnya. *Trust building* merupakan elemen terpenting dalam resolusi konflik. Hal tersebutlah yang berusaha dibangun melalui masyarakat sipil dalam rana *track II*.

### **2.1.3. Konsep Diplomasi Preventif**

Konsep diplomasi preventif pertama kali dikemukakan oleh sekretaris jenderal perserikatan bangsa-bangsa Dag Hammarskjold hampir setengah abad lalu dalam buku laporan tahunan tahun 1959 yang menyatakan bahwa diplomasi preventif aktif dapat dilakukan oleh setiap kelompok baik melalui PBB maupun perwakilan dari organisasi lainnya yang memiliki posisi netral untuk melakukan intervensi dalam sebuah konflik atau permasalahan (Ramcharan, 2008: 28-32). Sekretaris jenderal Boutros Boutros-Ghali dalam laporannya yang berjudul *An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping* menyebutkan bahwa diplomasi preventif merupakan “.....an action to prevent disputes from arising between parties, to prevent existing disputes from escalating into conflicts and to limit the spread of the latter when they occur” (Ramcharan, 2008: 45).

Sehingga, bisa dikatakan bahwa untuk menjaga perdamaian dunia diperlukan adanya diplomasi preventif sebagai upaya untuk mencegah perselisihan antara dua kelompok menjadi semakin meningkat dan membatasi efek dari perselisihan tersebut agar tidak meluas. Selain itu, adapun sasaran dari diplomasi preventif ialah untuk mengidentifikasi situasi yang dapat memunculkan konflik dan dengan melalui diplomasi

bahaya dari situasi tersebut dapat dihindari sebelum memunculkan terjadinya kekerasan.

Diplomasi preventif memiliki dua dimensi tujuan yakni bertujuan untuk mengurangi ketegangan sebelum menimbulkan konflik yang lebih besar dan untuk mengambil tindakan secara cepat dalam mengendalikan agar dampak konflik tidak menyebar apabila konflik terjadi. Diplomasi preventif dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya ialah fasilitasi, mediasi, rekonsiliasi, adjudikasi, dan arbitrase (Muggah & White, 2013: 5). Terdapat beberapa instrumen yang ada dalam melakukan diplomasi preventif, yakni (Ghali, 1992: 46-51):

1. *Build Confidence*

Membangun rasa saling percaya dan kejujuran merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam mengurangi kemungkinan konflik antar negara. Konflik pada dasarnya terjadi karena adanya rasa curiga yang besar diantara dua pihak. Oleh karena itu, perlu membangun kepercayaan diantara pihak yang berkonflik dan juga pada pihak ketiga yang akan menengahi konflik.

2. *Fact-finding*

Langkah pencegahan harus didasarkan pada ketepatan waktu dan keakuratan fakta. Perlu adanya pemahaman akan perkembangan dan tren global. Pencarian fakta konflik selain sebagai dasar keputusan pencegahan terjadinya konflik, namun juga dasar bagi penyelesaian konflik.

3. *Early Warning*

Tatanan regional dan organisasi memiliki peran penting dalam peringatan dini. Penguatan tatanan dalam hal seperti metode informasi dari sumber yang ada dapat dikumpul dan disatukan dengan indikator-indikator yang ada untuk menilai adanya ancaman atau perdamaian sehingga memungkinkan untuk menentukan tindakan apa yang seharusnya diambil.

Secara umum, diplomasi merupakan cara bernegosiasi dan berdialog dengan pihak lainnya guna mewujudkan kepentingan yang dimiliki. Upaya diplomasi dapat dilakukan melalui berbagai macam cara dengan melibatkan aktor dari berbagai macam unsur. Salah satu unsur yang sering terlibat dalam upaya diplomasi ialah organisasi masyarakat sipil atau CSO. Keterlibatan CSO dalam diplomasi disebut dengan *track II diplomacy*. Dalam paradigma *conflict preventive*, *Track II* merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan apabila diplomasi melalui *track I* dirasa tidak cukup efektif untuk meredam ketegangan dari kedua pihak yang berkonflik.

Seperti halnya dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea, dimana dalam level *track I* yang melibatkan negara sebagai instrumen penyelesaian konflik tidak menunjukkan hasil yang positif mengingat negara yang terlibat tentu memiliki kepentingan nasional masing-masing. Untuk itu, sebagai upaya alternatif penyelesaian konflik maka perlu ada keterlibatan pihak yang lebih netral dan tidak memiliki kepentingan lain selain untuk perdamaian.

Merujuk pada konsep diplomasi preventif maka bisa dijelaskan bahwa GPPAC merupakan salah satu aktor non-pemerintah yang terlibat dalam proses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea. Kehadiran GPPAC adalah bentuk dari *track II* diplomasi dan bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik dengan eskalasi yang lebih besar yang dapat mengancam keamanan di kawasan dan global. Dalam upaya diplomasi yang dilakukan, GPPAC mengedepankan upaya dialog untuk membangun *confidence* dan *trust* pihak yang berkonflik melalui tatanan *grassroot* atau masyarakat.

Dialog yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil setidaknya memberikan penawaran akan pengalaman yang berbeda mengenai pemecahan masalah, mediasi atau negosiasi yang mendorong terbentuknya hubungan antar kelompok masyarakat sipil untuk saling memberikan keterbukaan untuk berbagi dan mengumpulkan informasi

sebagai salah satu upaya menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea melalui *track II diplomacy*.

#### **2.1.4. Konsep *Civic Engagement***

Pada dasarnya, konsep keterlibatan warga negara (masyarakat) meliputi cakupan yang sangat luas karena seringkali didefinisikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pihak yang menggunakan konsep tersebut. Merujuk pada pendapat dari Carpini & Keeter (1996) dalam Pancer (2015: 3), *civic engagement* ialah “*individual and collective actions designed to identify and address issues of public concern*”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *civic engagement* merujuk pada aksi kolektif atau individual yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta menyampaikan isu yang menjadi perhatian publik. Merujuk pada pendapat tersebut, hal yang menjadi perhatian publik berkenaan dengan semenanjung Korea tidak lain ialah terkait proses perdamaian yang berusaha untuk dibangun melalui *track II*.

Berdasarkan pada *the american planning association* (2013), *civil engagement* didefinisikan sebagai “*the process of working collaboratively with individuals and groups to achieve specific goals*”. Dengan demikian, yang menjadi poin penting dari *civic engagement* ialah mencapai tujuan bersama. Varshney (2002) dalam Mujahidah (2015: 142-146) mengartikan *civic engagement* sebagai sebuah keterlibatan publik yang ditunjukkan melalui kerja sama. Adapun sifat dari *civic engagement* ialah non-negara dan melakukan kegiatan baik yang sifatnya sosial dan juga politik.

Sehingga dapat dikatakan bahwa GPPAC (*Global Networking for the Prevention of Armed Conflict*) merupakan salah satu bentuk dari *civic engagement* yang terlibat dalam sebuah proses kolaborasi guna mencapai *specific goals* yakni perdamaian untuk mencegah eskalasi konflik di Semenanjung Korea. Merujuk pada Putnam (1992: 167), salah satu hal yang diperhatikan sebagai wujud pembentukan *network* atau jaringan dalam *civic engagement* ialah membangun norma-norma dan

kepercayaan yang dapat memfasilitasi terbentuknya koordinasi guna mencapai tujuan bersama yang di cita-citakan yang dalam hal ini ialah perdamaian. Konsep *civic engagement* tersebut tentu sesuai dengan keterlibatan dari GPPAC dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea. Secara umum GPPAC dalam menjalankan keterlibatannya dalam upaya mendorong perdamaian didasarkan kepada empat strategi dasar yang diantaranya ialah *Network Strengthening and Regional Action*, *Action Learning*, *Public Outreach*, dan *Policy and Advocacy* (Enkhsaikhan, 2016: 4-6).

Adapun strategi tersebut dilakukan dengan beberapa langkah prioritas sebagai upaya mencegah konflik dengan kekerasan diantaranya ialah dialog, mediasi, pendidikan perdamaian, dan *human security*. Hal tersebut dilakukan dengan paradigma bahwa masyarakat sipil memiliki fleksibilitas dan pengalaman yang dapat menjadi peluang atau *opportunity* guna membangun dan terlibat dalam proses dialog yang dilakukan. Dalam menjalankan strateginya, GPPAC bekerjasama dan berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat yang disebut dengan jaringan. Jaringan tersebut dibentuk guna mencapai sinergitas dalam mencegah konflik dan membangun perdamaian dengan menghubungkan dan bekerja di berbagai level baik negara, regional, dan global yang didalamnya terdiri dari berbagai organisasi antar pemerintah, aktor negara, media, dan akademisi.

Merujuk pada konsep *civic engagement*, dapat dikatakan bahwa GPPAC merupakan sebuah bentuk jaringan masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai macam level masyarakat dan bekerja guna mencapai tujuan bersama yakni mencegah terjadinya konflik bersenjata dan menciptakan perdamaian. Hal tersebut dilakukan melalui aksi kolektif dengan melakukan dialog, dan juga pendidikan perdamaian.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama ialah **jurnal** yang ditulis oleh Bo-Hyuk Suh, dalam *The Journal of International Studies*, Vol. 14, No. 1 (April 2016), 53-75 yang berjudul *Resolving the Korean Conflict through a Combination of Human Rights and Human Security*. Dalam tulisannya, Hyuk Suh menjelaskan mengenai alternatif lain dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dengan menggunakan perpektif *macro-critical* yang menggabungkan sinergitas antara aspek *human right* dan *security* di Semenanjung Korea.

Menurut Hyuk, konflik yang terjadi di Semenanjung Korea sedikit banyak mengakibatkan perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat, khususnya di Korea Utara. Hal inilah yang oleh Korea Selatan sebagai salah satu cara untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara melalui aspek *human right*. Membangun kembali hubungan antara kedua Korea melalui pendekatan kemanusiaan tersebut salah satunya dilakukan oleh pemerintahan Kim Dae-Jung dan Roh Moo-Hyun. Keduanya berupaya untuk mendorong Korea Utara untuk meningkatkan hubungan dan membangun rezim yang damai di Semenanjung Korea.

Pemerintah Korea Selatan sadar bahwa isu HAM di Korea Utara telah menjadi kekhawatiran dan perhatian dunia Internasional. Selain itu, Korea Selatan sebagai salah satu anggota dari komunitas internasional, tentu memiliki kewajiban untuk aktif mempromosikan HAM di Korea Utara melalui perekatan kembali hubungan dengan cara rekonsiliasi dan kerjasama yang nantinya hal tersebut dapat diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Korea Utara. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga membuat kebijakan untuk melindungi para penduduk Korea Utara yang sengaja melarikan diri ke Korea Selatan melalui "*quite diplomacy*" guna melindungi keselamatan jiwa mereka. Selain itu, dalam tulisannya Hyuk juga menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mendekatkan

kembali hubungan kedua negara melalui pendekatan kemanusiaan ialah dengan rutin menggelar reuni keluarga yang terpisah.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa **persamaan** antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada instrumen dalam rangka menciptakan perdamaian di semenanjung Korea yakni dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya kemanusiaan (*soft power approach*). Kedua penelitian sama-sama menjelaskan mengenai upaya membangun kembali hubungan antara kedua negara dengan cara yang sifatnya *soft diplomacy*. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara penelitian terdahulu dengan penelitian dalam tesis ini.

Adapun **perbedaan** antara penelitian terdahulu pertama dengan penelitian ini ialah terletak pada aktor perdamaianya. Jika dalam penelitian Hyuk menitik beratkan pada aktor pemerintah atau *track I* yang dalam hal ini ialah pemerintah Korea Selatan, dalam penelitian yang baru justru lebih menitik beratkan pada keterlibatan CSO (*Civil Society Organization*) atau *track II* yang dalam hal ini ialah GPPAC (*Global Network for the Prevention of Armed Conflict*) sebagai inisiator perdamaian di Semenanjung Korea. Sehingga, penelitian terdahulu sifatnya ialah *Top-Down approach* maka penelitian dalam tesis ini ialah *Bottom-Up approach* dengan menekankan pada pembangunan kembali rasa kepercayaan dari pihak yang berkonflik dengan melibatkan peran masyarakat sipil atau melalui level *grassroot*.

Penelitian terdahulu yang **kedua** ialah **buku** yang ditulis oleh Leszek Buszynski dengan judul *Negotiating with North Korea: The Six Party Talks and the Nuclear Issue* dan diterbitkan oleh Routledge: New York pada tahun 2013 yang lalu. Dalam tulisannya, Leszek Buszynski menjelaskan bahwa negosiasi merupakan hal yang penting dalam menciptakan kondisi damai dan stabil. Selama ini, masalah yang menjadikan semenanjung korea sebagai salah satu wilayah berbahaya ialah adanya pengembangan nuklir dan misil oleh Korea Utara. Oleh

karena itu, sebagai upaya untuk menghentikan program nuklir Korea Utara dibentuklah sebuah forum pembicaraan atau dialog yang melibatkan enam negara yakni Amerika Serikat, China, Rusia, Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara yang kemudian lebih dikenal sebagai *six party talks*.

Meski demikian, *six party talks* difungsikan tidak hanya berfokus pada isu nuklir dan misil, namun juga mengenai topik keamanan yang lebih luas, pencegahan konflik dan ekonomi, serta menjadi *emergency support* bagi Korea Utara apabila terjadi kegagalan rezim. Selain itu, *six party talk* juga diharapkan mampu bertransformasi dari hanya berupa proses konsultatif menjadi alat pencegahan konflik dan kekacauan di Semenanjung Korea. Walaupun demikian, dalam mewujudkan situasi tersebut *six party talk* tentu tidak dapat bekerja sendiri. Perlu adanya hubungan multilateralisme yang melibatkan ASEAN, EU, Australia, IAEA, dan UN guna mewujudkan stabilitas di Semenanjung Korea.

**Persamaan** antara tulisan dari Leszek Buszynski ialah sama-sama membahas mengenai upaya bagaimana menciptakan kondisi aman dan perdamaian di Semenanjung korea melalui dialog dan negosiasi dimana dalam penelitian yang akan dilakukan juga berfokus pada usaha perdamaian di Semenanjung Korea dengan upaya dialog. Meskipun demikian, **perbedaan** antara kedua tulisan ialah terletak pada aktor yang terlibat dan mekanisme penyelesaian konflik. Dalam penelitian terdahulu, aktor yang terlibat berada pada level negara atau *track 1* dengan melibatkan beberapa negara diantaranya ialah China, Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Korea Selatan, dan Utara. Pendekatan yang dilakukan juga hanya menyentuh ranah negara saja tanpa melibatkan peran masyarakat sipil dalam upaya menyelesaikan konflik. Berbeda dengan penelitian yang baru bahwa mekanisme upaya perdamaian justru dimulai dalam tataran masyarakat sipil dalam hal ini organisasi non-internasional dengan melibatkan peran dari akademisi dan masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam satu jaringan global yang bernama GPPAC.

Penelitian dahulu yang **ketiga** ialah **jurnal** dari Philo Kim, dalam *International Journal of Korean Unification Studies* Vol. 24, No. 1, 2015, 1-33 yang berjudul *Social Conflict and Identity Crisis in Unified Korea*. Menjelaskan mengenai bagaimana unifikasi Korea Utara dan Selatan merupakan sebuah peristiwa yang bersejarah dan penting yang bisa menumbuhkan perdamaian atau justru memunculkan konflik lebih besar. Semua itu tergantung dari persiapan dan rencana yang matang oleh pihak-pihak terkait.

Unifikasi merupakan isu dan peristiwa penting pada abad ke-21 di Semenanjung Korea yang untuk mencapainya membutuhkan transformasi dalam hal identitas nasional dan berbagai bidang sosial lainnya seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dll. Migrasi yang dilakukan oleh masyarakat Korea Utara bisa menjadi pemicu terjadinya kekacauan sosial serta adanya perbedaan yang semakin besar antara penduduk Korea Utara dan Selatan. Hal tersebut tentu akan memperkuat terjadinya konflik kelas apabila ide unifikasi tercapai. Disamping itu semua, perbedaan ideologi antara kedua negara menjadi hambatan yang paling besar bagi terciptanya unifikasi.

Besarnya rasa kebencian dan rasa saling curiga yang telah terbangun juga menjadi beban bagi proses terwujudnya integrasi sosial dalam unifikasi Korea. Oleh karena itu, terdapat empat hal yang bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut, yang antara lain ialah:

- a. Kekacauan sosial dan konflik sebaiknya diminimalisir melalui perbaikan ekonomi dan tindakan institusional
- b. Koherensi sosial dan pembentukan identitas baru hendaknya dikuatkan dengan visi, nilai dan prinsip yang baru
- c. Program-program yang bermanfaat bagi kedua Korea harus dilaksanakan dalam mendukung unifikasi
- d. Manajemen internet dan informasi siber diperlukan untuk memperkecil adanya konflik sosial dan terjadinya krisis identitas setelah tercapainya unifikasi di Semenanjung Korea

Agar seluruh hal tersebut dapat terlaksana, yang terpenting ialah perlu adanya komitmen kedua negara untuk mengakhiri perselisihan dan mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea. Pemahaman yang sama dan komunikasi intensif perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. **Persamaan** antara tulisan yang menjadi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ialah pemahaman terkait bagaimana mewujudkan pemahaman bersama dan perdamaian di semenanjung Korea melalui komunikasi yang dilakukan melalui cara-cara yang sifatnya *soft power* yakni dengan mediasi, negosiasi, dan juga dialog. Oleh karenanya, mekanisme yang digunakan oleh tulisan tersebut dengan penelitian ini menjadi satu titik kesamaan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana, **perbedaannya** ialah jika tulisan tersebut justru melihat mengenai kondisi yang akan terjadi jika terjadi unifikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan (penyatuan kembali kedua negara) maka dalam penelitian ini akan lebih menyorot terkait bagaimana perdamaian itu dapat dicapai melalui masyarakat sipil. Meskipun kedua penelitian memiliki perbedaan yang sangat jauh, namun penulis tetap memasukkannya kedalam penelitian terdahulu karena dalam tulisan dari Philo Kim tersebut dapat menjadi referensi yang sangat membantu untuk menjawab mengenai konteks konflik dan kondisi yang mungkin terjadi apabila perdamaian telah dicapai dan unifikasi dilakukan.

Penelitian yang **keempat** ialah **Jurnal** yang ditulis oleh Hem Raj Subedi dan Meena Bhatta yang berjudul *Role of Civil Society in Conflict Resolution and Peacebuilding in Nepal*. Melalui jurnal tersebut, Hem Raj Subedi dan Meena Bhatta ingin menjelaskan mengenai peran dari masyarakat sipil dalam resolusi konflik dan *peace building* di Nepal pasca konflik *Maoist* yang terjadi antara tahun 1996 hingga 2006 yang lalu setelah penandatanganan perjanjian damai atau *Comperhensive Peace Agreement* (CPA). Meskipun setelah adanya CPA, situasi di Nepal masih sangat rawan.

Peran masyarakat sipil di Nepal telah berlangsung sejak awal ditandatanganinya perjanjian damai, namun kehadiran dari masyarakat sipil tersebut justru tidak mampu untuk aktif dalam proses *peacebuilding*. Hal ini tidak lain karena setiap organisasi masyarakat sipil yang terlibat justru memiliki kepentingan masing-masing dan banyak diantara mereka yang memiliki nilai yang berbeda dengan masyarakat Nepal kebanyakan. Sehingga banyak diantara masyarakat sipil tersebut yang tidak mampu untuk memfasilitasi proses perdamaian jika terjadi kembali konflik.

Namun, kehadiran sebagian masyarakat sipil lainnya di Nepal juga cukup membantu proses *peacebuilding* dalam membentuk masyarakat yang menjadi korban dapat mendapatkan kembali keadilan secara hukum. Oleh karenanya, dalam tulisan yang ditulis oleh Hem Raj Subedi dan Meena Bhatta, lebih banyak menjelaskan mengenai bagaimana masyarakat sipil dalam konteks *peacebuilding* yang ideal dan apa yang seharusnya dilakukan oleh para masyarakat sipil yang terlibat tersebut.

**Persamaan** dari penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama menjelaskan mengenai bagaimana keterlibatan daripada masyarakat sipil dalam proses menciptakan perdamaian. Selain itu, penulis tesis memasukkan jurnal dari Hem Raj Subedi dan Meena Bhatta kedalam salah satu penelitian terdahulu ialah karena kedua penelitan sama-sama menggunakan konsep keterlibatan masyarakat sipil dalam proses perdamaian. Meskipun demikian, **perbedaan** yang dimiliki oleh kedua penelitian ialah terdapat pada fokus dan lokus masalah. Yang mana, dalam penelitian terdahulu lokus masalah ialah konflik di Nepal dan fokus penelitannya ialah efektifitas masyarakat sipil dalam *peacebuilding*. Berbeda dengan penelitian baru yang mana lokus penelitiannya ialah terkait konflik di Semenanjung Korea dan fokus masalahnya lebih kepada proses perdamaian di Semenanjung Korea.

Penelitian terdahulu **kelima** ialah **Jurnal** yang berjudul *Civil Society and Peace Negotiations: Confronting Exclusion* dalam jurnal *international negotiation* Vol. 13, 11-36, 2008 yang ditulis oleh Anthony Wanis-St. John

dan Darren Kew. Di dalam jurnal tersebut, penulis menjelaskan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses negosiasi. Di dalam tulisannya, dijelaskan mengenai peran aktif masyarakat sipil baik secara langsung dalam proses negosiasi maupun tidak langsung namun tetap memberikan signifikansi terkait negosiator (khususnya dalam level negara atau *track I*).

Argumen dasar dari Wanis dan Darren ialah kelompok masyarakat sipil memainkan peran yang cukup signifikan dalam proses perdamaian pasca konflik telah menjadi sebuah dogma mainstream dalam konsep resolusi konflik internasional. Memang, tidak sedikit masyarakat sipil yang pada akhirnya tidak mampu untuk terlibat langsung dan bisa duduk dalam meja perundingan karena adanya peran yang jauh lebih tinggi yakni negara. Namun, merujuk pada kenyataan yang ada justru masyarakat sipil memainkan peran yang sentral dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Oleh karenanya, dalam penelitian terdahulu Daren dan Wanis ingin menjelaskan mengenai korelasi antara keterlibatan masyarakat sipil dalam proses negosiasi guna pencapaian perjanjian damai yang berkelanjutan.

Kelompok masyarakat sipil menurut Wanis dan Darren merupakan aktor yang aktif sebagai insiator dalam level *track II* yang juga berperan sebagai pelengkap atau *supplement* dari negosiasi yang dijalankan oleh *track I* yang melibatkan elit politik. Namun, jika dalam sebuah upaya perdamaian *track I* tidak berfungsi dengan baik atau *absence* maka kelompok masyarakat sipil dapat dilihat sebagai aktor yang potensial dalam menjaga keberlangsungan komunikasi pihak yang bertikai ketika *primary channel* (saluran pertama) telah tertutup.

Untuk memperjelas keterlibatan masyarakat sipil dalam negosiasi, Wanis dan Darren dalam tulisannya mengajukan beberapa usul yang diantaranya ialah membagi tingkat keterlibatan masyarakat sipil ke dalam tiga level, yakni:

- a. Tinggi, yaitu masyarakat sipil yang berkoalisi memiliki kursi dalam proses negosiasi perdamaian tersebut. Adapun kursi tersebut bisa diberi atau justru yang menginisiasi.
- b. Sedang, yaitu masyarakat sipil yang tidak memiliki kursi dalam proses negosiasi, namun memberikan pengaruh yang signifikan kepada pihak lain yang terlibat
- c. Rendah, yaitu masyarakat sipil yang tidak memiliki kursi maupun akses serta pengaruh yang kecil atas pihak yang terlibat negosiasi

Lebih jauh, Anthony Wanis-St. John dan Darren Kew dalam tulisannya juga menjelaskan mengenai hasil dari keterlibatan masyarakat dalam proses perdamaian, antara lain ialah *Sustained Peace*, *Cold Peace* dan *Resumed War*. Secara umum, keterlibatan masyarakat sipil dalam proses negosiasi memberikan dampak yang jauh lebih signifikan khususnya jika *track I* melibatkan aktor yang tidak demokratis dan banyak membawa kepentingan. Masyarakat sipil baik yang non-pemerintah atau organisasi kemanusiaan lainnya mampu menyediakan keahlian spesifik yang penting dalam mencapai perjanjian dalam proses *peacebuilding*. Mengingat, kemampuan advokasi dan negosiasi, serta struktur organisasi yang demokratis oleh masyarakat sipil dapat mendorong dan mendukung proses perdamaian baik dalam rana lokal maupun internasional.

Merujuk pada penelitian terdahulu dari Anthony Wanis-St. John dan Darren Kew, **persamaan** penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ialah keduanya membahas mengenai keterlibatan masyarakat sipil dalam proses mencapai dan menciptakan perdamaian. Secara umum, penelitian terdahulu memberikan gambaran dan juga konsep mengenai keterlibatan masyarakat sipil yang tentunya konsep tersebut akan digunakan sebagai rujukan dalam penelitian baru yang akan dilakukan mengingat fokus penelitian sama-sama membahas mengenai proses perdamaian oleh masyarakat sipil. Meskipun demikian, baik penelitian terdahulu maupun penelitian yang baru keduanya memiliki perbedaan. Adapun **perbedaan** antara kedua penelitian tersebut terdapat

pada objek penelitian. Jika objek penelitian terdahulu hanya menjelaskan mengenai masyarakat sipil, maka penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan contoh masyarakat sipil sebagai bagian dari *Global Partnership for Prevention of Armed Conflict* (GPPAC) dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea.

Berikut merupakan tabel penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul, Tahun	Pendekatan/ Teori Konsep Metodolgi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Bo-Hyuk Suh, The Korean Journal of International Studies, Vol. 14, No. 1 (April 2016), 53-75. ( <i>Resolving the Korean Conflict through a Combination of Human Rights and Human Security</i> )	Perspektif <i>macro-critical</i> , konsep damai, konsep keamanan, konsep <i>human right</i> .  (Kualitatif, Eksplanatif)	Konflik korea menjadi salah satu konflik yang sulit untuk diselesaikan, karena konflik korea merupakan sebuah cerminan dimana kekuatan politik kedua negara akan selalu berusaha mempertahankan kepentingan negara masing-masing. Masih adanya ketidakpercayaan dan <i>animosity</i> menjadikan semenanjung Korea masih sangat rentan akan ketegangan. Sehingga, perlu adanya upaya untuk membentuk sinergitas yang lebih positif terhadap pembangunan perdamaian positif melalui pendekatan nilai atau paradigma <i>human right</i> . Menurut penulis, titik utama untuk mewujudkan	Kedua penelitian menggunakan pendekatan yang sifatnya kemanusiaan ( <i>soft power approach</i> ). Keduanya sama-sama menjelaskan upaya membangun kembali hubungan antara kedua negara dengan cara yang sifatnya diplomatis/ <i>Soft power</i> .	Jika dalam penelitian Hyuk menitik beratkan pada aktor pemerintah atau <i>track I</i> yang dalam hal ini ialah pemerintah Korea Selatan, dalam penelitian yang baru lebih menitik beratkan pada keterlibatan aktor masyarakat sipil atau <i>track II</i> yang dalam hal ini ialah GPPAC ( <i>Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict</i> ) sebagai inisiator perdamaian konflik di Semenanjung Korea. Sehingga, jika penelitian terdahulu sifatnya ialah <i>Top-Down approach</i> maka penelitian dalam tesis ini ialah <i>Bottom-Up</i> dengan

			sinergitas positif antara kedua negara ialah melalui komunikasi, bantuan, dan pertukaran.		menekankan pada pembangunan kembali rasa kepercayaan.
2	Leszek Buszynski Book Published by Routledge: New York, 2013 ( <i>Negotiating with North Korea: The Six Party Talks and the Nuclear Issue</i> )	<i>Bargaining and Negotiation Theory</i>  (Kualitatif, Eksplanatif)	Negosiasi ialah hal yang penting dalam menciptakan kondisi damai dan stabil. Adapun yang menjadi masalah ialah terkait Nuklir Korea Utara, sehingga untuk menghentikan program nuklir Korea Utara dibentuklah sebuah forum pembicaraan yang melibatkan enam negara yakni Amerika Serikat, China, Rusia, Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara yang kemudian lebih dikenal sebagai <i>six party talks</i> . Selain itu, <i>six party talk</i> juga diharapkan bertransformasi dari hanya proses konsultatif menjadi alat pencegahan konflik dan kekacauan di Semenanjung Korea.	Sama-sama membahas mengenai upaya bagaimana menciptakan kondisi aman dan perdamaian di Semenanjung korea melalui dialog dan negosiasi dimana dalam penelitian yang akan dilakukan juga berfokus pada usaha perdamaian di Semenanjung Korea dengan upaya dialog	Dalam penelitian terdahulu, aktor yang terlibat berada pada level negara atau <i>track I</i> dan hanya menyentuh ranah negara saja tanpa melibatkan peran masyarakat sipil dalam upaya menyelesaikan konflik. Sedangkan, dalam penelitian yang baru mekanisme upaya perdamaian justru dimulai dalam tataran masyarakat sipil atau <i>civil society organization</i> (CSO) dengan melibatkan peran dari akademisi.

3	Philo Kim, International Journal of Korean Unification Studies Vol. 24, No. 1, 2015, 1-33 ( <i>Social Conflict and Identity Crisis in Unified Korea</i> )	<i>Concept of social integration, Concept of unification, Theory of social identity, Theory of social conflict</i>  (Kualitatif, Eksplanatif)	Unifikasi Korea Utara dan Selatan merupakan peristiwa penting di Semenanjung Korea yang untuk mencapainya membutuhkan transformasi identitas nasional dan berbagai bidang sosial lainnya seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dll. Kehadiran masyarakat yang berasal dari Utara bisa saja menjadi pemicu kekacauan sosial apabila kedua negara sepakat untuk bergabung kembali. Oleh karenanya, perlu menciptakan komunikasi yang efektif guna menemukan pemahaman yang sama antara kedua negara baik dalam level pemerintah ataupun masyarakat.	Persamaan terletak pada pemahaman bahwa untuk mewujudkan perdamaian Semenanjung Korea maka perlu komunikasi dengan menggunakan cara-cara seperti mediasi, negosiasi, dan juga dialog.	Penelitian terdahulu justru melihat mengenai kondisi yang akan terjadi jika unifikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sedangkan dalam penelitian ini akan lebih menyorot terkait bagaimana perdamaian itu dapat dicapai melalui level masyarakat sipil.
4	Hem Raj Subedi, Meena Bhatta. ( <i>Role of Civil Society in</i>	Konsep <i>civil society</i> , Teori Resolusi Konflik,	Untuk meningkatkan efektifitas <i>peacebuilding</i> , organisasi masyarakat sipil yang terlibat perlu	Keduanya menjelaskan mengenai bagaimana keterlibatan masyarakat sipil dalam proses	Perbedaan terdapat pada fokus dan lokus penelitian. Dalam penelitian terdahulu

	<i>Conflict Resolution and Peacebuilding in Nepal</i>	Konsep <i>Peacebuilding</i>  (Kulitatif - Eksplanatif)	berkomunikasi diantara mereka dan menjalin kerjasama dengan pihak parlemen, pemerintah, atau administrasi negara lainnya.	menciptakan perdamaian. Sehingga, konsep yang digunakan oleh kedua penelitian pun sama yakni konsep masyarakat sipil	lokus masalah ialah konflik di Nepal dan fokus penelitiannya ialah efektifitas masyarakat sipil dalam <i>peacebuilding</i> . Lokus penelitian baru ialah Semenanjung Korea dan fokus masalahnya lebih kepada proses perdamaian yang melibatkan masyarakat sipil
5	Anthony Wanis-St. John dan Darren Kew. ( <i>Civil Society and Peace Negotiations: Confronting Exclusion, International negotiation</i> Vol. 13, 11-36, 2008 )	Konsep <i>Civil Society</i> , Konsep Negosiasi  (Kualitatif-Diskriptif)	Kelompok masyarakat sipil ialah aktor yang aktif sebagai insiator dalam level <i>track II</i> dan berperan sebagai pelengkap atau <i>supplement track I</i> . Namun, jika <i>track I</i> tidak berfungsi dengan baik maka kelompok masyarakat sipil menjadi aktor yang potensial dalam menjaga keberlangsungan komunikasi pihak yang berkonflik. Keterlibatan masyarakat sipil dalam	keduanya membahas mengenai keterlibatan masyarakat sipil dalam proses mencapai dan menciptakan perdamaian. Secara umum, penelitian terhadahu memberikan gambaran dan juga konsep mengenai keterlibatan masyarakat sipil yang tentunya konsep tersebut akan	Jika objek penelitian terdahulu hanya menjelaskan mengenai masyarakat sipil, maka penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan contoh masyarakat sipil sebagai bagian dari GPPAC dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea.

			<p>negosiasi, dapat dibagi menjadi tiga level, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Tinggi</li><li>b. Sedang</li><li>c. Rendah</li></ol>	<p>digunakan sebagai rujukan dalam penelitian baru yang akan dilakukan mengingat fokus penelitian sama-sama membahas mengenai proses perdamaian oleh masyarakat sipil. Meskipun demikian, baik penelitian terdahulu maupun penelitian yang baru keduanya memiliki perbedaan yang cukup besar</p>	
--	--	--	---	--	--

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Semenanjung Korea merupakan salah satu wilayah yang rentan akan terjadinya konflik bersenjata. Konflik antara Korea Selatan dan Utara yang masih berlangsung hingga saat ini menjadi salah satu sumber ancaman bagi stabilitas keamanan regional dan global. Ketegangan antara kedua Korea serta proliferasi Nuklir dan peningkatan kekuatan persenjataan oleh Korea Utara yang semakin meningkat menyebabkan kondisi keamanan di semenanjung Korea semakin tidak menentu. Salah satu upaya yang diperlukan untuk mencegah agar ketegangan tersebut tidak menjadi konflik yang lebih besar dan berdampak pada kondisi keamanan global ialah perdamaian.

Upaya perdamaian antara kedua Korea telah dilakukan sejak lama yang diantaranya ialah melalui *six party talk forum* yang melibatkan beberapa negara yakni Amerika Serikat, China, Rusia, Jepang dan Kedua Korea. Meskipun demikian, upaya dalam level negara masih belum efektif menciptakan perdamaian. Sehingga, perlu adanya alternatif lain dalam upaya perdamaian di Semenanjung Korea. Salah satunya ialah dengan melibatkan masyarakat sipil dalam proses perdamaian tersebut.

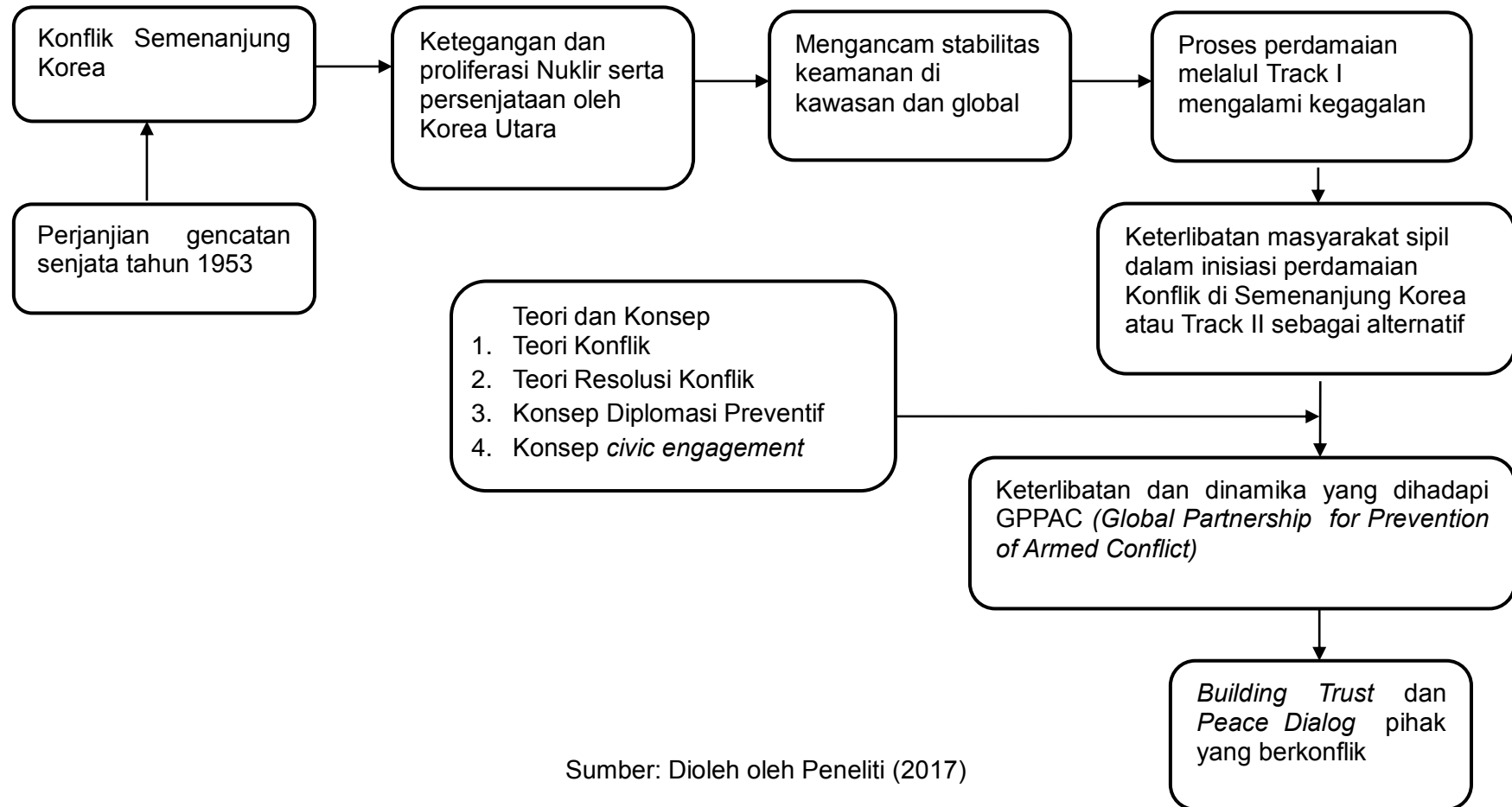
Masyarakat sipil memiliki peran yang cukup penting dalam upaya menciptakan perdamaian melalui pendekatan ditingkat *grassroot* atau masyarakat. Oleh karenanya, mekanisme yang digunakan pun lebih kepada membangun perdamaian melalui fasilitasi berupa dialog dan juga pertemuan lainnya. Salah satu organisasi masyarakat sipil yang saat ini turut terlibat aktif dalam proses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea ialah GPPAC (*Global Partnership of the Prevention of Armed Conflict*).

Di tengah dinamika hubungan Korea Selatan dan Utara yang sangat fluktuatif, upaya yang dilakukan GPPAC untuk menciptakan perdamaian tidak lain ialah mencegah agar ketegangan tersebut tidak berlanjut dalam eskalasi yang jauh lebih besar dan dapat berdampak bagi keamanan kawasan dan juga global. Selain itu, ancaman nyata dari kegiatan proliferasi nuklir oleh Korea Utara dan peningkatan kekuatan

militernya juga turut menjadi tantangan terbesar dan seruan untuk terwujudnya perdamaian di Semenanjung Korea semakin menguat.

Oleh karenanya, dalam penelitian ini penulis berupaya untuk menganalisa bagaimana keterlibatan GPPAC dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea dan bagaimana dinamika GPPAC dalam melakukan inisiasi perdamaian tersebut. Sehingga mampu untuk menciptakan rasa saling percaya diantara pihak yang berkonflik demi mewujudkan dialog perdamaian di Semenanjung Korea yang dimulai dari tatangan paling bawah yakni masyarakat atau *grassroot*. Untuk menganalisa, peneliti ini menggunakan teori konflik, teori resolusi konflik, konsep diplomasi preventif dan konsep *civic engagement* dengan mekanisme *track II* sebagai landasan berpikir. Berikut merupakan bagan kerangka pemikiran dari penelitian ini secara keseluruhan, yakni:

**Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran**



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2017)